



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Agustus 2026

JUDUL

"Penanggulangan Kemiskinan Melalui Corporate Social Responsibility (CSR)"

Fokus Strategis

Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tim Ahli

Dr. I Nyoman Sudipa, ST.M.Si

Tenaga Ahli Bidang Sosial Budaya

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Kemiskinan merupakan salah satu isu strategis di dalam perencanaan pembangunan, karenanya diperlukan intervensi secara optimal oleh Pemerintah Daerah. Berpijak dari hal tersebut, penanggulangan kemiskinan dijadikan fokus pembangunan dari tahun ke tahun. Ada dua jenis kemiskinan yang perlu dicermati, yaitu kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Kemiskinan makro merupakan hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berfungsi sebagai basis perencanaan. Sedangkan kemiskinan mikro merupakan hasil verifikasi data oleh Dinas Sosial yang digunakan untuk intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Di era tata kelola korporasi modern, indikator kesuksesan sebuah perusahaan tidak lagi dinilai secara tunggal dari seberapa tebal laporan laba-rugi finansialnya. Dunia investasi global kini menuntut kepatuhan yang ketat terhadap aspek Environmental, Social, and Governance (ESG). Sebagai implementasi rill, perusahaan wajib mengarahkan investasi sosialnya untuk menyentuh pilar People (Manusia) dengan menjadikan kesejahteraan sosial program CSR sebagai kompas utama aktivitas lapangan.

agi masyarakat, intervensi sosial yang tepat—seperti perbaikan gizi, jaminan pendidikan, dan pembukaan akses ekonomi—akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di tingkat akar rumput. Bagi korporasi, komunitas sekitar yang sejahtera dan berdaya saing merupakan perisai sosial terbaik untuk meminimalisir risiko gesekan di lapangan, konflik lahan, atau demonstrasi. Ketika warga merasa diuntungkan oleh kehadiran industri, perusahaan secara otomatis mengamankan Izin Sosial untuk Beroperasi (Social License to Operate) sekaligus mendongkrak skor ESG di mata investor global.

I. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan peran dunia usaha dalam penanggulangan sesuai amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dunia usaha wajib melaksanakan program kemitraan bina lingkungan dan corporate social responsibility.

II. Ide dan Gagasan

Agar intervensi sosial perusahaan tidak menguap begitu saja dan mampu melahirkan kemandirian, tim Community Development (Comdev) perlu menerapkan tiga pilar inovasi berikut:

1. Perlindungan Sosial Inklusif bagi Kelompok Rentan Program jaminan sosial harus mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sering kali luput dari perhatian, seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan perempuan kepala keluarga (janda). Aktivitas Nyata: Menyelenggarakan pelatihan keterampilan khusus yang ramah disabilitas (misalnya kerajinan tangan atau digitalisasi administrasi), memberikan bantuan alat bantu dengar/kursi roda, serta memfasilitasi jaminan perlindungan kesehatan (seperti kepesertaan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan mandiri yang didanai perusahaan pada fase awal).

2. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pemenuhan Gizi (Anti-Stunting)

Kesejahteraan tidak akan tercapai jika kualitas fisik generasi penerusnya terancam oleh masalah gizi buruk. Aktivitas Nyata: Menggulirkan program intervensi stunting terpadu dengan memberikan makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal secara berkala, melakukan edukasi sanitasi bersih (WASH), serta melatih kader Posyandu desa binaan agar mampu melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak secara digital.

3. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Kelembagaan Desa Memutus rantai kemiskinan secara permanen harus dilakukan dengan cara membangun mesin uang yang berputar langsung di dalam komunitas desa. Aktivitas Nyata: Membentuk dan membina unit usaha komunal, seperti Koperasi Wanita atau menyuntikkan modal dan teknologi kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Langkah yang dilakukan :

1. Pendataan dunia usaha yang ada di kabupaten Klungkung

2. melakukan pendekatan dengan mengundang dunia usaha untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan.

3. Membuat regulasi

4. Melaksanakan kegiatan, monitoring, dan evaluasi

III. Rekomendasi

Kegiatan ini perlu diimplementasikan dalam aksi nyata dan dijadikan gerakan bersama pemerintah daerah dan dunia usaha dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan IPM Kabupaten Klungkung.

Semarang, 02 September 2026

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-